



PENETAPAN

Nomor 148/Pdt.P/2023/PA.Tlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara tersebut antara:

Lukman Hakim bin Dawung, NIK. 5207043112990018, tempat dan tanggal lahir Cotek, 13 Januari 1999, Umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan/Perikanan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Senutuk, Rt. 004/Rw 003, Desa Ai Kangkung, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai Pemohon I;

Saida Marvia Putri binti Jumahir, NIK. 5207045503010002, tempat dan tanggal lahir Tongo, 15 Maret 2001, Umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Senutuk, Rt. 004/Rw 003, Desa Ai Kangkung, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonan tanggal 01 Agustus 2023 mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang, dengan Nomor 148/Pdt.P/2023/PA.Tlg, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/PA.Tlg



1. Bahwa pada tanggal 06 Juni 2017, para Pemohon telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam di Desa Ai Kangkung, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I (Lukman Hakim bin Dawung) berstatus Perjaka dalam usia 18 tahun, dan Pemohon II (Saida Marvia Putri binti Jumahir), berstatus Perawan dalam usia 16 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jumahir dan dihadiri dua orang saksi bernama : Lalu Nakum dan Amaq Ita, dengan maskawin berupa Emas 8 (delapan) gram, dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa setelah menikah para Pemohon hidup rukun dan telah dikarunai 1 (satu) orang Anak yang bernama Iqbal Maliki bin Lukman Hakim, jenis Kelamin Laki-laki, Umur 2 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut, para Pemohon tidak pernah bercerai dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai dengan sekarang para Pemohon tidak mempunyai buku kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, dengan alasan faktor ekonomi dan kelalaian;
7. Bahwa para Pemohon membutuhkan penetapan istbath nikah ini untuk kepastian hukum dan sebagai syarat untuk mengurus kelengkapan administrasi kependudukan;
8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (Lukman Hakim bin Dawung) dengan Pemohon II (Saida Marvia Putri binti Jumahir) yang terjadi pada tanggal 06 Juni 2017;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/PA.Tlg



9. Bahwa Para Pemohon merupakan orang yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, untuk itu para pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Lukman Hakim bin Dawung), dengan Pemohon II (Saida Marvia Putri binti Jumahir), yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2017, di Desa Ai Kangkung, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Membebaskan para pemohon dari biaya perkara;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sehingga perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Taliwang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5207043112990018 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.1;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/PA.Tlg



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5207045503010002 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.3;

B. Saksi:

1. Rume bin Mudre, umur 42 tahun, agama islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Sanutuk RT.004 RW.003, Desa Ai Kangkung Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena paman Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Juni 2017 di Desa Ai Kangkung, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat dan saksi menghadiri acara akad nikah para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi status Pemohon I ketika menikah adalah perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jumahir dan ijab kabul diucapkan secara langsung oleh wali dan Pemohon I dengan mahar Emas 8 (delapan) gram, dibayar tunai dan yang menjadi saksi nikah adalah : Lalu Nakum dan Amaq Ita ;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah/nasab, hubungan semenda dan sesusuan yang menghalangi sah pernikahan (halal nikah);

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/PA.Tlg



- Bahwa saksi mengetahui sejak akad nikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon dan tetap menjadi suami isteri, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan para Pemohon telah dikarniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat karena kelalaian;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. Adi bin Merap, umur 45 tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Sanutuk RT.004 RW.003, Desa Ai Kangkung Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Juni 2017 di Desa Ai Kangkung, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bawa saksi diundang dan menghadiri acara akad nikah para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II dan ijab Kabul diucapkan secara langsung oleh wali dan Pemohon I dengan mahar Emas 8 (delapan) gram, dibayar tunai dan;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi nikah para Pemohon adalah Lalu Nakum dan Amaq Ita;
- Bahwa setahu saksi status Pemohon I ketika menikah adalah perjakadan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah/nasab, hubungan semenda dan sesusuan yang menghalangi sah pernikahan (halal nikah);

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/PA.Tlg



- Bahwa saksi mengetahui sejak akad nikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon dan tetap menjadi suami isteri, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, karena kelalaian para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Taliwang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir sendiri menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang pada pokoknya memohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan pada tanggal 06 Juni 2017 di Desa Ai Kangkung, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam duduk perkara penetapan ini;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/PA.Tlg



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon telah jelas menunjukkan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil para Pemohon sendiri dan bukti P.1 dan P.2 tentang domisili para Pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Taliwang, maka dengan didasarkan kepada Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Perubahannya, sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I adalah kepala keluarga dan Pemohon II adalah istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengenai pernikahan para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengenai pernikahan para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg.;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/PA.Tlg



Menimbang, bahwa berdasarkan proses persidangan telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. B
ahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah menurut syariat agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 06 Juni 2017 di Desa Ai Kangkung, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat;
2. B
ahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Jumahir dan ijab Kabul diucapkan secara langsung oleh wali dan Pemohon I dan yang menjadi saksi nikah adalah Lalu Nakum dan Amaq Ita, dengan maskawin Emas 8 (delapan) gram, dibayar tunai;
3. B
ahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab/darah, semenda dan bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak ketiga yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
7. B
ahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap rukun dan masih tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terbukti bahwa perkawinan para Pemohon tersebut telah dilaksanakan sesuai syariat Islam dengan terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan sebagaimana

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/PA.Tlg



ditentukan dalam Pasal 6 sampai dengan 9 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 14 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi “ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” dan sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “ *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang menyatakan :

يُقْبَلُ إِفْرَارُ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ بِنِكَاحِ إِمْرَأَةٍ إِنْ صَدَّقْتُهُ كَعَكْسِهِ

Artinya : “*(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya*”;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Abdullah bin Mas'ud yang berbunyi :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَ شَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ وَ الْبَيْهَقِيُّ)

Artinya : “ *Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil*”;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/PA.Tlg



Menimbang, bahwa para Pemohon mohon agar perkawinannya dapat disahkan untuk keperluan sebagai alas hukum untuk mengurus penerbitan Buku Nikah dan dokumen-dokumen lain, alasan mana dapat dipertimbangkan karena jelas mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat permohonan para Pemohon mohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2017 di Desa Ai Kangkung, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, patut dinyatakan sah oleh karena telah beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 5 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 34 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon I dan Pemohon II dapat mencatatkan pernikahannya di wilayah hukum Kantor Urusan Agama tempat terjadinya pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon, oleh karena para Pemohon miskin, maka berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Taliwang Nomor 148/Pdt.P/2023/PA.Tlg tanggal 1 Agustus 2023, Pemohon I dan Pemohon II telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma/prodeo sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 dan Pasal 8 serta Pasal 9 ayat (5) Perma Nomor 1 Tahun 2014, sehingga biaya perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Taliwang tahun 2023;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/PA.Tlg



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Lukman Hakim bin Dawung**) dengan Pemohon II (Saida Marvia Putri binti Jumahir) yang dilangsungkan pada tanggal 06 Juni 2017 di Desa Ai Kangkung, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Taliwang tahun 2023;

Demikian ditetapkan oleh **Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy.**, sebagai Hakim tunggal Pengadilan Agama Taliwang pada hari senin tanggal 21 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1444 Hijriah, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **M. Anwar, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy.
Panitera Pengganti,

M. Anwar, SH

Perincian biaya : Rp0,00 (*nol rupiah*)

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/PA.Tlg